

Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan *Intellectual capital*

Sarifah Aini

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus UNP Air Tawar Padang

Email: sarifahain@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the relationship between board of commissioner and board of management characteristics to intellectual capital disclosure (ICDI). The intellectual capital disclosure measurement in this study used the index developed by Haji and Nazli (2012). The data were collected from 32 banks listed in Indonesia Stock Exchange period 2014-2016. Sampling method using purposive sampling. This study find no significant relations betseen intellectual capital disclosure and board of commissioner and board of management characteristics.

Keyword : *intellectual capital disclosure, board of commissioner, board of management, banking indusry*

PENDAHULUAN

Latar belakang masalah

Intellectual capital merupakan kepemilikan dari pengetahuan dan pengalaman, pengetahuan profesional dan keahlian, hubungan yang baik, dan kapasitas penguasaan teknologi yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif atau nilai perusahaan bagi organisasi atau perusahaan (CIMA, 2001). *Intellectual capital* menarik perhatian para akademisi maupun praktisi secara luas. Bagi perusahaan, *intellectual capital* adalah sumber keunggulan kompetitif yang dapat menambah nilai perusahaan (Drucker, dalam Yan 2017).

Dalam era informasi sekaran ini, nilai yang besar tidak lagi berasal dari aset berwujud perusahaan tetapi berasal dari *intellectual capital*. Untuk lebih bersaing di pasar modern, banyak perusahaan

meningkatkan jumlah investasi pada *intsangible asset* seperti *intellectual capital* untuk mempromosikan pertumbuhan perusahaannya (Dzinkowski, dalam Yan 2017). Menurut Li *et al.* (2008) jika diterapkan dengan baik, *intellectual capital* akan menciptakan keunggulan daya saing karena mengandung keterampilan, kapasitas teknologi, pengetahuan, dan hubungan baik yang dibutuhkan perusahaan agar dapat terus bertahan.

Taylor & Associates (2011) menunjukkan bahwa *intellectual capital disclosure* termasuk kedalam 10 peringkat informasi teratas yang diperlukan oleh *stakeholders* maupun *shareholders*. Menurut teori keagenan, pengungkapan *Intellectual capital* dapat meredakan konflik keagenan dan mengurangi masalah asimetri informasi sehingga meningkatkan nilai dari perusahaan (Singh & Zahn, 2008; Amran & Davi, 2011). Dimana masalah asimetri

informasi timbul karena adanya pemisahan kepemilikan antara *principal* (pemilik) dan *agent* (managemen) (Ruth *et al.*, 2011), sedangkan konflik keagenan timbul karena pihak *agent* memilih untuk memaksimalkan kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan pemegang saham (Yan, 2017).

Beberapa temuan empiris di Indonesia menunjukkan bahwa pengungkapan *intellectual capital* perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) masih rendah. Suhardjanto & Wardhani (2010) menemukan hasil bahwa hanya 34% yang telah melakukan pengungkapan *intellectual capital*, sementara itu hasil penelitian Uzliawati (2015) menunjukkan peningkatan yaitu sebanyak 52% perusahaan telah melakukan pengungkapan *intellectual capital*. Persentase peningkatan pengungkapan *intellectual capital* tersebut masih di bawah 60% sedangkan informasi modal intelektual penting bagi perusahaan dan investor dimana Price Waterhouse Coopers (dalam Santoso, 2012) mengidentifikasi bahwa *intellectual capital disclosure* merupakan strategi penting bagi perusahaan.

Di Indonesia, *intellectual capital* mulai berkembang sejak munculnya PSAK No. 19 (revisi 2010) tentang aset tidak berwujud, tetapi tidak disebutkan tentang *intellectual capital* secara rinci. Menurut PSAK No. 19 (revisi 2010) aset tidak berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tanpa adanya wujud fisik. Aset tidak berwujud dapat dibagi dalam 2 kelompok, yaitu aset tidak berwujud yang memiliki masa berakhirnya, seperti hak paten, hak cipta, hak sewa, dan aset tidak berwujud yang tidak dapat dipastikan masa berakhirnya, seperti *goodwill*, proses dan formula rahasia dan merk dagang.

Pengungkapan *intellectual capital* dalam laporan tahunan perusahaan masih bersifat sukarela (*voluntary*). Belum adanya peraturan yang mewajibkan pengungkapan informasi *intellectual capital* pada perusahaan - perusahaan public dalam laporan tahunana mengakibatkan perusahaan bisa memilih untuk tidak mengungkapkan *intellectual capital* yang dimilikinya. Dalam penelitian yang meneliti tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengungkapan *intellectual capital* seperti penelitian dan Yan (2017), Li *et al.* (2008), Cerbioni & Parbonetti (2007), Hidalgo *et al.* (2011), menunjukkan hasil bahwa adanya hubungan yang kuat antara *corporate governance* terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Menurut Syakhroza (2003) *corporate governance* adalah suatu sistem yang dipakai dewan untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis dan produktif dengan prinsip – prinsip *transparan, accountable, responsible, independent*, dan *fairness* (TARIF) dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Syahroza (2003) juga menjelaskan bahwa dewan adalah pucuk pimpinan suatu organisasi yang bertanggungjawab untuk mengarahkan dan mengendalikan serta mengawasi pemakaian sumber daya agar selaras dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dewan komisaris dan direksi merupakan bagian dari atribut tata kelola perusahaan yang secara umum berperan penting dalam tatakelola perusahaan. Syahroza (2003) menyatakan bahwa dewan komisaris dan direksi adalah yang bertanggungjawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengarahan, pengendalian dan pengawasan atas

pengelolaan sumber daya sesuai dengan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan.

Lukviarman (2004) menyatakan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang bertugas sebagai penasihat dan pengawas direksi. Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan (FCGI, 2001). Holland (2006) juga menyatakan bahwa direksi memiliki peran aktif dalam proses pengungkapan terkait dengan penyediaan informasi modal intelektual.

Karakteristik dari dewan komisaris dan direksi yang peneliti gunakan yaitu ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dewan komisaris wanita, ukuran direksi dan jumlah rapat direksi. Ukuran dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dari dewan komisaris yang diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengungkapan *intellectual capital*. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 jumlah dewan komisaris paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris. Yan (2017) berpendapat bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka akan semakin baik pengawasan yang dapat dilakukan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 menyatakan bahwa dalam dewan komisaris harus ada dewan komisaris independen paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Komisaris independen merupakan komisaris yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat menekan perusahaan untuk terlibat dalam pengungkapan tambahan seperti pengungkapan *intellectual*

capital (Haniffa & Cooke, dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013).

Keberadaan dewan komisaris wanita menurut Kusumastuti *et al.* (2007) mampu mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan *intellectual capital*, karena sifat wanita yang sangat teliti dan berhati-hati dalam mengambil keputusan dibandingkan pria. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Carter *et al.* (2003) bahwa dengan adanya keberagaman dewan dipercaya dapat mempengaruhi nilai perusahaan, karena dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah yang beragam daripada anggota dewan yang homogen.

Ukuran direksi merupakan salah satu karakteristik direksi yang diharapkan mampu meningkatkan jumlah pengungkapan *intellectual capital*. Hidalgo *et al.* (2011) menyatakan bahwa lebih banyak direksi dalam struktur dewan perusahaan bisa mengkompensasi kekurangan individu dalam pengambilan keputusan. Menurut teori agensi, besaran ukuran direksi akan mampu mengurangi masalah koordinasi dan meningkatkan kemampuan dewan untuk melakukan tindakan strategis dalam pengambilan keputusan.

Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) berpendapat bahwa salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal adalah dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui frekuensi sering mengadakan rapat direksi dalam membahas masalah perusahaan. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 disebutkan bahwa direksi wajib mengadakan rapat direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Menurut Khanchai (dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013) frekuensi rapat direksi dapat menjadi bukti bahwa anggota direksi

berkomitmen dan aktif dalam mengelola perusahaan.

Beberapa penelitian juga telah membahas mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *intellectual capital disclosure*. Diantaranya Allegrini & Greco (2011) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *intellectual capital disclosure*. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) serta Abeysekera (2010) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap *intellectual capital disclosure*.

Independensi dewan komisaris dalam penelitian Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) dan Cerbioni & Parbonetti (2007) menunjukkan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori agensi dimana dewan komisaris independen mampu meningkatkan keefektifan peran dewan komisaris. Tetapi hasil penelitian tersebut berbeda dengan penelitian Nugroho (2012) dan Arifah (2012) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh positif independensi dewan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian Putri, I.N & Chairiri (2016) menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dewan komisaris wanita terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sedangkan penelitian Uzliawati (2015) menunjukkan hasil yang berbeda, bahwa dewan komisaris wanita tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Besaran direksi dalam penelitian Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh besaran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*, namun dalam penelitian Hidalgo *et al.* (2011) dan Yan (2017) menunjukkan adanya pengaruh

positif ukuran direksi terhadap *intellectual capital disclosure*.

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui bahwa hasil penelitian sebelumnya masih beragam dan belum ada peraturan yang mengatur tentang *intellectual capital*, padahal pengungkapan *intellectual capital* termasuk dalam sepuluh peringkat informasi teratas yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan. Dengan demikian maka penulis tertarik mengangkat penelitian ini dengan judul “Pengaruh Karakteristik Dewan Komisaris dan Direksi Terhadap Pengungkapan *Intellectual capital*”. Dengan adanya penelitian ini dapat mengetahui apakah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dewan komisaris wanita, ukuran direksi dan rapat direksi berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016.

KAJIAN TEORI

Agency Theory

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan bagaimana hubungan antara principal sebagai pemilik dan agent sebagai manajemen yang menjalankan perusahaan sehingga mendatangkan nilai tambah bagi perusahaan. Pada model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agent*), sehingga dibutuhkan kontrak antara kedua belah pihak tersebut. Dalam kesepakatan kontrak diharapkan dapat memuaskan agen.

Menurut Scott (2015: 358) teori keagenan merupakan cabang dari *gametheory* yang mempelajari skema dari kontrak untuk memotivasi agen yang rasional untuk bertindak sesuai keinginan dari principal. Hubungan agensi terjalin ketika salah satu pihak (*principal*)

menyewa pihak lain (agent) untuk melaksanakan jasa yang berhubungan dengan tugas yang akan dilakukannya, serta principal memberikan wewenang kepada agent untuk membuat keputusan. Namun, dalam praktiknya kadangkala terjadi konflik yang disebabkan karena agent sering kali bertindak untuk kepentingannya sendiri dan mengesampingkan kepentingan principal. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya konflik, konflik ini disebut dengan konflik keagenan. Munculnya konflik disebabkan karena adanya asimetri informasi atau adanya kesenjangan informasi antara agent dengan principal, yang mana agent sebagai pihak yang menyediakan informasi dan principal sebagai pengguna informasi.

Intellectual capital

Edvinsson dan Malone (dalam Shiddiq, 2013) mendefinisikan *intellectual capital* sebagai pengetahuan yang tidak terlihat secara fisik yang dapat dikonversi menjadi nilai tamba bagi perusahaan meskipun tidak terlihat dalam laporan keuangan. Selain itu, *intellectual capital* juga didefinisikan secara luas sebagai perbedaan atau selisih antara nilai pasar dan nilai buku perusahaan (Ordonez de Pablos, dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013). Oleh karena itu, *intellectual capital* dapat didefinisikan sebagai semua proses berdasarkan aset tidak berwujud yang mencakup sumber daya perusahaan yang biasanya tidak ditampilkan dalam laporan posisi keuangan dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Sveiby (1997) membagi *intellectual capital* ke dalam tiga komponen, yaitu:

1) Struktur internal (*internal structure*), meliputi struktur organisasi, sistem-sistem manual, dan perangkat lunak.

2) Struktur eksternal (*external structure*), meliputi hubungan dengan pelanggan dan pemasok serta merk dan nama perusahaan.

3) Kompetensi karyawan (*employee competence*), meliputi pendidikan dan pelatihan bagi para karyawan dan staf perusahaan.

Klasifikasi Sveiby (1997) kemudian dimodifikasi oleh Guthrie & Petty (2000) menjadi modal internal (*internal capital*), modal eksternal (*external capital*), dan modal manusia (*human capital*). Menurut Guthrie *et al.* (2004), modal internal (*internal capital*) meliputi kebijakan, budaya, sistem, dan kemampuan organisasi lainnya yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Modal eksternal (*external capital*) mencakup hubungan eksternal dengan orang-orang di luar organisasi, dan modal manusia (*human capital*) mencakup pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan keahlian karyawan.

Penelitian ini menggunakan indeks pengukuran yang dikembangkan oleh Haji & Nazli (2012). Penggunaan indeks ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yaitu: a) Checklist yang digunakan lebih komprehensif dan mencakup tiga kategori *intellectual capital* yaitu modal internal, modal eksternal dan modal manusia, b) Checklist ini sesuai dengan negara peneliti karena checklist ini merupakan pengembangan dari beberapa peneliti yang mempertimbangkan negara-negara berkembang seperti (Guthrie & Petty, 2000; Bontis, 2003; Bozzolan *et al.*, 2003;), c) Checklist ini terdiri dari 40 item yaitu 14 item untuk human capital, 9 item untuk struktual capital, dan sisanya 17 item untuk relational capital.

Corporate Governance

Corporate governance adalah suatu sistem atau cara di mana perusahaan dikendalikan agar perusahaan bertanggung jawab kepada stakeholders (Dahya *et al.*, dalam Haji, A. A & Mohd Ghazali, 2013). Menurut Cadbury Committee of United Kingdom dalam Forum for *Corporate governance* in Indonesia (FCGI), *corporate governance* diartikan sebagai:

Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pemerintah, pihak kreditur, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka.

Terdapat praktik *corporate governance* yang berbeda yaitu berasal sistem hukum yang berbeda (FCGI, 2001). Sistem tersebut adalah *one tier system* dari Anglo Saxon dan *two tier system* dari Kontinental Eropa. Negara-negara yang menggunakan *one tier system* adalah Amerika Serikat, Inggris, Canada, dan Australia. Sedangkan negara-negara yang menggunakan *two tier system* adalah Jerman, Belanda, Denmark, dan Jepang. Indonesia menggunakan *two tier system* dalam struktur dewan perusahaan karena pengaruh sistem hukum Indonesia berasal dari sistem hukum Belanda.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direktur atau direksi. Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014 bahwa dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum serta memberi

nasihat kepada direksi. Di Indonesia, dewan komisaris ditunjuk oleh RUPS dan di dalam peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik yang dijabarkan mengenai fungsi wewenang dan tanggung jawab dari dewan komisaris. Menurut peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 pada pasal 20 ayat (1) bahwa dewan komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota dewan komisaris.

Dewan komisaris bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh direksi agar sesuai dengan peraturan dan kepentingan pemangku kepentingan. Fungsi kontrol yang dilakukan oleh dewan komisaris terhadap direksi dapat mengurangi biaya agensi. Hal ini dapat berarti bahwa dewan komisaris dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan yang terjadi antara pihak agen dengan pihak prinsipal dengan melakukan pengungkapan informasi *intellectual capital*.

Direksi

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014, direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. FCGI (2001) menyatakan bahwa direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab dalam mengelola perusahaan.

Menurut peraturan OJK Nomor 33 /POJK.04/2014 bahwa direksi pada emiten

atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota direksi dan 1 (satu) di antara anggota direksi diangkat menjadi direktur utama atau presiden direktur.

Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variable kontrol untuk mengendalikan beberapa variable lain. Pertama, *Listing age* dijadikan sebagai variabel kontrol didasarkan pada asumsi bahwa perusahaan-perusahaan yang lebih muda atau baru terdaftar akan memiliki asimetri informasi yang cenderung lebih tinggi (Li *et al*, 2008; Singh & Van der Zahn, 2008). Kedua, *profitabilitas* menjadi variabel kontrol dengan asumsi bahwa semakin tinggi tingkat *profitabilitas* yang dimiliki oleh perusahaan akan meningkatkan pengungkapan *intellectual capital*. Variable ini secara konsisten ditemukan berhubungan dengan pengungkapan *intellectual capital* (Li *et al.*, 2008; 2012). Ketiga, penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan karena perusahaan besar lebih terlihat dan lebih mungkin untuk memenuhi permintaan investor terkait informasi (Li *et al.*, 2008). Variable ini secara konsisten ditemukan berhubungan dengan pengungkapan (Li *et al.*, 2008; Cerbioni & Parbonetti, 2007).

Pengembangan Hipotesis

Hubungan ukuran dewan komisaris dengan pengungkapan *intellectual capital*

Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota yang ada dalam dewan komisaris. Semakin besar dewan komisaris, maka semakin besar kemungkinan dalam mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh direksi. Yan (2017) berpendapat bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan semakin baik pengawasan yang dapat dilakukan. Hal ini dipertegas dengan

pernyataan Hidalgo *et al.* (2011) bahwa ukuran dewan komisaris yang besar bisa menguntungkan karena mereka dapat meningkatkan keahlian dan mengawasi kecurangan yang dilakukan oleh direksi secara bersama-sama..

Sejumlah penelitian menemukan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif terhadap pengungkapan *intellectual capital* (Li *et al*, 2008; Haji A.A & Mohd Ghazali, 2013). Allegrini & Greco (2011) juga menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap voluntary disclosure, seperti *intellectual capital* disclosure. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Hubungan komisaris independen dengan pengungkapan *intellectual capital*

Dewan komisaris merupakan suatu badan dalam perusahaan yang anggotanya terdiri dari komisaris independen dan non independen. Dewan komisaris yang independen berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana & Herawaty, 2007). Komisaris independen memiliki peran utama untuk memastikan bahwa terlindungnya kepentingan pemegang saham dengan baik (Fama, dalam Uzliawati, 2015). Dari perspektif pengungkapan, komisaris independen diharapkan dapat menekan perusahaan untuk terlibat dalam pengungkapan *intellectual capital* (Haniffa & Cooke, dalam Haji A.A & Mohd Ghazali, 2013).

Independensi dewan komisaris dalam penelitian Cerbioni & Parbonetti (2007) dan Haji, A.A & Mohd Ghazali (2013) menunjukkan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori agensi dimana dewan komisaris independen mampu meningkatkan keefektifan peran dewan komisaris. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Hubungan dewan komisaris wanita dengan pengungkapan *intellectual capital*

Keberadaan dewan komisaris wanita dianggap dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan atas *intellectual capital*, karena sifat wanita yang sangat teliti dan sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan dibandingkan pria (Kusumastuti *et al*, 2007). Untuk itu dengan adanya wanita dalam jajaran komisaris dikatakan dapat meningkatkan pengungkapan informasi modal intelektual.

Dewan komisaris wanita dapat mengkomunikasikan kepada manajemen akan pentingnya melakukan praktik pengungkapan *intellectual capital* untuk menambah nilai perusahaan. Seiring meningkatnya permintaan untuk *intellectual capital disclosure*, hal ini dapat mendorong peran dewan komisaris wanita dalam meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif dewan komisaris wanita terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Hubungan ukuran direksi dengan pengungkapan *intellectual capital*

Asumsi dalam teori agensi menyebutkan bahwa semakin besar ukuran direksi maka akan mengurangi masalah koordinasi dan meningkatkan kemampuan dewan untuk melakukan tindakan strategis dalam pengambilan keputusan. Ukuran direksi yang lebih besar dapat meningkatkan pemantauan dalam menangani aktivitas perusahaan. Demikian pula, lebih banyak

direksi dalam struktur dewan perusahaan bisa mengkompensasi kekurangan individu dalam keterampilan melalui pengambilan keputusan kolektif dewan.

Abeysekera (2010) dan Hidalgo *et al*. (2011) keduanya menemukan pengaruh positif ukuran direksi terhadap internal capital taktis dan strategis pengungkapan *intellectual capital*. Abdul Rashid *et al*. (2012) juga mengamati hubungan positif yang signifikan ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan IPO di Malaysia. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Hubungan rapat direksi dengan pengungkapan *intellectual capital*

Teori keagenan menyatakan bahwa tujuan utama dari manajer (*agent*) adalah memaksimalkan kepentingan agen dan prinsipal, dengan demikian para manajer akan bertindak dengan berbagai cara untuk menyenangkan para pemegang saham (prinsipal). Salah satu cara untuk membangun hubungan yang sehat dengan prinsipal adalah dengan menunjukkan komitmen anggota dewan melalui frekuensi rapat direksi dalam membahas masalah perusahaan. Frekuensi rapat direksi dapat menjadi bukti bahwa anggota dewan berkomitmen dan aktif dalam mengelola perusahaan (Khanchei, dalam Haji, A.A & Mohd Ghazali, 2013). Hal ini akan meningkatkan kapasitas pemantauan dan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan informasi modal kapital.

Penelitian empiris sebelumnya tidak mempertimbangkan pengaruh rapat direksi terhadap pengungkapan sukarela. Namun, beberapa penelitian menguji pengaruh frekuensi rapat komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital* (Li *et al*,

2008; Taliyang dan Jusop, 2011). Kedua penelitian ini melaporkan pengaruh positif yang signifikan antara frekuensi rapat direksi dengan tingkat pengungkapan *intellectual capital* di Inggris dan Malaysia. Oleh karena itu, peneliti berharap adanya pengaruh positif rapat direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*

Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual di atas dan didukung oleh teori yang ada, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

- H1 : Ada hubungan positif antara ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
- H2 : Ada hubungan positif antara proporsi komisaris independen terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
- H3 : Ada hubungan positif antara dewan komisaris wanita terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
- H4 : Ada hubungan positif antara ukuran direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.
- H5 : Ada hubungan positif antara rapat direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kausatif dengan populasi penelitian yaitu perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 hingga tahun 2016.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu cara pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan tertentu atau berdasarkan kriteria tertentu. Dimana kriteria pengambilan sampel perusahaan dilakukan

berdasarkan kriteria sebagai berikut : a) Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2014 sampai tahun 2016, b) Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan tahunan (annual report) secara lengkap dari tahun 2014 sampai tahun 2016, c) Laporan keuangan perusahaan dinyatakan dalam mata uang rupiah, d) Data yang tersedia lengkap (data secara keseluruhan tersedia dari tahun 2014 sampai tahun 2016), yaitu data-data yang terkait variabel penelitian.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka diperoleh sampel sebanyak 32 perusahaan. Jenis data pada penelitian ini adalah data dokumenter, dimana datanya berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengungkapan *intellectual capital* sebagai variabel dependen dan karakteristik dewan komisaris (ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dewan komisaris wanita) dan karakteristik direksi (ukuran direksi dan rapat direksi) sebagai variabel independen.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi panel. Pemilihan model yang tepat menggunakan uji chow dan hausman. Model terdiri dari Common effect, fixed effect dan random effect. Selain itu, dilakukan uji kelayakan model yang terdiri dari uji Koefisien Determinasi (R²), uji F statistik, dan yang terakhir uji hipotesis (uji t).

HASIL PENELITIAN

Analisis Induktif

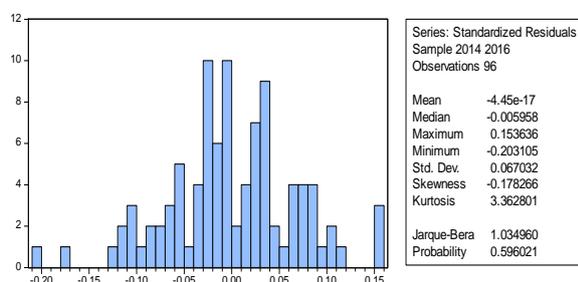
Analisis Model Regresi Panel 1) Uji Chow, Chow test atau uji chow yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat

digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah: H_0 : Common Effect Model atau pooled OLS H_a : Fixed Effect Model. Berdasarkan hasil uji chow dengan menggunakan eviews (lampiran) di dapat probability untuk perusahaan lebih kecil dari level signifikan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 untuk model ini ditolak dan H_a di terima, sehingga estimasi yang lebih baik digunakan dalam model ini adalah Fixed Effect Model (FEM). Untuk itu perlu dilanjutkan ke Hausman Test. Berdasarkan hasil Chow Test atau Likelihood Test (lampiran), maka dibutuhkan uji Hausman. Statistik Uji Hausman mengikuti distribusi statistik Chi-Square. Jika nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya (0,05) maka H_a diterima dan model yang tepat adalah model fixed effect, begitupun sebaliknya. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut: H_0 : Random Effect Model, H_a : Fixed Effect Model

Hasil uji pemilihan model Hausman dapat diketahui bahwa menggunakan common effect. Sehingga diperlukan uji asumsi klasik untuk regresi pengungkapan *intellectual capital*.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Dari gambar 2 diatas dapat dilihat bahwa nilai residual data model ICDI normal, dimana nilai probabilitasnya $> \alpha$ (0,05)

yaitu, $0,596021 > 0,05$. Hal ini menandakan bahwa data yang diolah terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

| Uji Heterokedas tistitas | Obs*R-squared | Prob. Chi Square |
|--------------------------|---------------|------------------|
| Model ICDI | 2.372856 | 0.9674 |

Menurut Wing (2009), jika probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared $> \alpha$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas. Berdasarkan Tabel di atas, probabilitas Chi-Square dari Obs*R-squared adalah 0,9674, berarti tidak ada gejala heterokedastisitas karena $0,9674 > 0,05$.

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-Watson. Apabila nilai Durbin-Watson yang dihasilkan berada dalam rentang 1,54 s/d 2,46, maka dapat dinyatakan bahwa model yang digunakan terbebas dari gangguan autokorelasi.

| Kelompok | Uji Darbin Waton |
|------------|--------------------|
| | Durbin-Watson Stat |
| Model ICDI | 1.941735 |

Berdasarkan tabel di atas, nilai Durbin-Watson model ICDI adalah 1,941735 sehingga tidak terdapat gejala autokorelasi

Uji Multikolonearitas

Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolonearitas, maka dapat dilihat dari nilai *Centered Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 maka terbebas dari multikolonearitas. Berikut adalah hasil uji multikolonearitas non *income smoothing* model 1 adalah:

| Variable | Centered VIF |
|----------|-----------------|
| C | NA |
| BOC_SIZE | 2.242673 |
| BOC_IND | 1.277265 |
| BOC_FEM | 1.112895 |
| BOM_SIZE | 2.447989 |

| | |
|----------|----------|
| BOM_MEET | 1.397819 |
| AGE | 1.655092 |
| REV | 1.413303 |
| ROA | 1.206035 |

Dalam tabel 19 dapat dilihat bahwa nilai VIF kecil dari 10, sehingga tidak terjadi multikolinearitas atau bebas dari multikolinearitas.

Hasil Estimasi Regresi Panel dengan *Fixed Effect Model*

Persamaan Regresi :

$$ICDI = \beta_0 + \beta_1 BOC_{SIZE} + \beta_2 BOC_{IND} + \beta_3 BOC_{FEM} + \beta_4 BOM_{SIZE} + \beta_5 BOM_{MEET} + \beta_6 AGE + \beta_7 ROA + \beta_8 REV + \varepsilon_i$$

| Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob. |
|----------|-------------|------------|-------------|--------|
| BOC_SIZE | -0.003574 | 0.010573 | -0.337970 | 0.7366 |
| BOC_IND | 0.000529 | 0.000879 | 0.601413 | 0.5500 |
| BOC_FEM | -0.002719 | 0.001115 | -2.439067 | 0.0179 |
| BOM_SIZE | 0.003088 | 0.006112 | 0.505266 | 0.6154 |
| BOM_MEET | -0.001260 | 0.001281 | -0.983256 | 0.3297 |
| AGE | 0.018960 | 0.005985 | 3.167922 | 0.0025 |
| REV | 5.01E-16 | 4.72E-16 | 1.062606 | 0.2925 |
| ROA | 0.010600 | 0.007298 | 1.452539 | 0.1519 |
| C | 0.173789 | 0.117064 | 1.484567 | 0.1433 |

| | | | |
|--------------------|----------|-----------------------|-----------|
| R-squared | 0.867614 | Mean dependent var | 0.402865 |
| Adjusted R-squared | 0.775417 | S.D. dependent var | 0.095205 |
| S.E. of regression | 0.045118 | Akaike info criterion | -3.064734 |
| Sum squared resid | 0.113996 | Schwarz criterion | -1.996256 |
| Log likelihood | 187.1072 | Hannan-Quinn criter. | -2.632838 |
| F-statistic | 9.410434 | Durbin-Watson stat | 2.490750 |
| Prob(F-statistic) | 0.000000 | | |

Uju Model

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 20, diketahui bahwa *adjusted R²* yang diperoleh sebesar 0.7754. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi variabel

independen terhadap variabel dependen sebesar 77,54% dan sebesar 22,46% ditentukan oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam model penelitian ini.

b. Uji F (Simultan)

Untuk nilai F value yang diperoleh sebesar 9.410434***, yang artinya nilai probabilitas F -statistic lebih kecil dari nilai sig (0,05) Hal ini menandakan bahwa model regresi panel diterima atau model regresi ini menunjukkan tingkatan yang baik (*good overall model fit*) sehingga model regresi dapat digunakan untuk mengukur pengaruh karakteristik dewan komisaris dan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

c. Uji Hipotesis (t-Test)

- 1) Hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil dari regresi menunjukkan bahwa koefisien β ukuran dewan komisaris bernilai negatif sebesar -0,003574, nilai t_{hitung} -0,337970, dan nilai signifikansi 0,7366. Hal ini berarti bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*, sebab nilai signifikan lebih besar dibandingkan dengan alpha penelitian 5% (0,7366 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan hipotesis 1 ditolak.
- 2) Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil dari regresi menunjukkan bahwa koefisien β proporsi dewan komisaris independen (BOC IND) bernilai positif sebesar 0,000529, nilai t_{hitung} 0,601413, dan nilai signifikansi 0,5500. Hal ini berarti bahwa proporsi dewan komisaris independen memiliki arah hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan *intellectual capital* terlihat dari nilai signifikansi lebih besar dari pada nilai alpha (0,5500 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan hipotesis 2 ditolak.
- 3) Hipotesis ketiga (H3) dalam penelitian ini adalah dewan komisaris wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil dari regresi menunjukkan bahwa koefisien β dewan komisaris wanita (BOC_FEM) bernilai negatif sebesar -0,002719, nilai t_{hitung} -2,439067, dan nilai signifikansi 0,0179. Hal ini berarti bahwa dewan komisaris wanita memiliki pengaruh negatif signifikan secara parsial terhadap pengungkapan *intellectual capital*, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 3 ditolak.
- 4) Hipotesis kedua (H4) dalam penelitian ini adalah ukuran direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil dari regresi menunjukkan koefisien β ukuran direksi (BOM_SIZE) bernilai positif sebesar 0,003088, nilai t_{hitung} 0,505266, dan nilai signifikansi 0,6154. Hal ini berarti bahwa ukuran direksi memiliki arah hubungan positif dan tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap pengungkapan *intellectual capital* terlihat dari nilai signifikansi lebih besar dari pada nilai alpha (0,6154 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan hipotesis 4 ditolak.
- 5) Hipotesis ketiga (H5) dalam penelitian ini adalah rapat direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hasil dari regresi menunjukkan bahwa koefisien β rapat direksi (BOM_MEET) bernilai negatif sebesar -0,001260, nilai t_{hitung} -0,983256,

dan nilai signifikansi 0,3297. Hal ini berarti bahwa rapat direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 5 ditolak.

Variabel kontrol Umur Perusahaan (*AGE*) pada model penelitian ini menunjukkan koefisien positif (0,018960), signifikansi uji t lebih kecil dari α ($0,0025 < 0,05$). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Umur Perusahaan (*AGE*) berpengaruh memiliki arah positif dan berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel kontrol Ukuran Perusahaan (*REVENUE*) diperoleh koefisien positif ($5.01E-16$), signifikansi uji t lebih besar dari α ($0,2925 > 0,05$). Dari hasil variabel kontrol Ukuran Perusahaan (*REVENUE*), yang merupakan proksi ukuran perusahaan dapat disimpulkan tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Variabel kontrol Profitabilitas (*ROA*) pada model penelitian ini menunjukkan koefisien positif (0,010600), signifikansi uji t lebih besar dari α ($0,1519 > 0,05$). Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa Profitabilitas (*ROA*) memiliki arah positif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama, ditemukan dalam penelitian ini bahwa hipotesis H1 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak

memengaruhi luas pengungkapan *intellectual capital* yang diungkapkan perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Li *et al.* (2008) dan Haji A.A & Mohd Ghazali (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*, hal ini didasarkan bahwa pihak luar manajemen (publik) yang memiliki saham ingin memperoleh informasi seluas-luasnya tentang perusahaan tempat menanamkan modalnya, semakin banyak pula pihak yang membutuhkan informasi terkait perusahaan dan hal tersebut mendorong perusahaan untuk memberikan informasi pengungkapan *intellectual capital* yang lebih luas.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*. Semakin banyak jumlah dewan komisaris di dalam sebuah perusahaan, tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya dewan komisaris suatu perusahaan ketika jumlahnya relatif besar, karena akan mengganggu fungsi dan tugas dewan komisaris tersebut.

2. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil uji hipotesis kedua, ditemukan dalam penelitian ini bahwa hipotesis H2 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas

pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini berarti proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* yang diungkapkan perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Uzliawati (2015) dan Li *et al.* (2008) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*. Namun hasil penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2012) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan *intellectual capital*.

Komisaris independen tidak mempengaruhi *intellectual capital disclosure* karena tingkat konservatisme. Konservatisme adalah kualitas angka-angka yang dilaporkan di neraca atau laba dalam L/R. Dengan komisaris yang besar, maka tugas dan wewenang dewan komisaris independen dalam mengawasi manajemen tidak optimal sehingga tingkat konservatisme menyebabkan tidak optimal, ketidak optimalan hasil mengakibatkan tidak optimalnya informasi yang diungkapkan. Hal ini juga dikarenakan fungsi dan peran *governance* yang kurang optimal umumnya di Negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini terbukti dari maraknya KKN, kebijakan yang tidak efektif dan efisien, dan malfungsi birokrasi (Suyuti: 2011).

3. Pengaruh Dewan Komisaris Wanita Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil uji hipotesis ketiga, ditemukan bahwa dalam

penelitian ini bahwa hipotesis H3 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan *intellectual capital*. Artinya semakin banyak dewan komisaris wanita dalam sebuah perusahaan tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan *intellectual capital*.

Temuan penelitian sejalan dengan penelitian Uzliawati dan (2015) dan Kusumastuti (2007) dengan hasil penelitian yaitu dewan komisaris wanita tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*, diduga karena wanita kurang menyukai risiko daripada pria, sehingga wanita memiliki persentase yang rendah dalam beberapa jabatan daripada pria (Charness dan Gneezy 2004). Selain itu, Indonesia menganut system kekerabatan patrilineal (garis keturunan ayah) dimana bapak memegang control (kendali) atas seluruh anggota keluarga, kepemilikan barang, sumber pendapatan dan pemegang keputusan utama . Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Carter *et al.* (2003) dan Kusumastuti *et al.* (2007) yang menyatakan bahwa dewan komisaris wanita berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan sukarela. Semakin banyak dewan komisaris wanita semakin luas informasi pengungkapan *intellectual capital* yang diungkapkan perusahaan.

4. Pengaruh Ukuran Direksi Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil uji hipotesis keempat, ditemukan dalam penelitian ini bahwa hipotesis H4 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran direksi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *intellectual*

capital. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran direksi tidak memengaruhi luas pengungkapan *intellectual capital* yang diungkapkan perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yan (2017), Haji A.A & Mohd Ghazali (2013) dan Carbioni (2011) yang menyatakan bahwa ukuran direksi berpengaruh terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*. Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*. Semakin banyak jumlah dewan direksi di dalam sebuah perusahaan, tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya dewan direksi suatu perusahaan ketika jumlahnya relatif besar, karena akan mengganggu fungsi dan tugas dewan direksi tersebut.

5. Pengaruh Rapat Direksi Terhadap Pengungkapan *Intellectual Capital*

Berdasarkan hasil uji hipotesis kelima, ditemukan dalam penelitian ini bahwa hipotesis H5 ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa rapat direksi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini menunjukkan bahwa rapat direksi tidak memengaruhi luas pengungkapan *intellectual capital* yang diungkapkan perusahaan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haji A.A & Mohd Ghazali (2013) yang menyatakan bahwa rapat direksi berpengaruh terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*. Hal

ini berarti bahwa frekuensi rapat direksi tidak dapat menjadi bukti bahwa anggota direksi dapat memaksimalkan pengungkapan informasi tambahan perusahaan seperti luasnya pengungkapan *intellectual capital*.

Namun hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran rapat direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*. Semakin banyak rapat direksi di dalam sebuah perusahaan, tidak berpengaruh terhadap luasnya pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya rapat yang dilakukan oleh direksi dalam satu periode tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh karakteristik dewan komisaris dan direksi terhadap pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014 sampai tahun 2016. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang diajukan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa :

1. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016
2. Proporsi komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016
3. Proporsi dewan komisaris wanita berpengaruh signifikan negatif terhadap

luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 - 2016

4. Ukuran direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016
5. Rapat direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan *intellectual capital* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2014 – 2016

Keterbatasan

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu revisi penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan terdapatnya unsur subjektivitas dalam menentukan indeks pengungkapan *intellectual capital*. Hal ini dikarenakan tidak adanya ketentuan baku yang dapat dijadikan acuan, sehingga penentuan indeks pengungkapan *intellectual capital* dapat berbeda untuk setiap peneliti.
2. Nilai *adjusted R-Square* dari penelitian ini yaitu sebesar 77,54% menunjukkan bahwa masih ada 22,46% variabel lain yang memiliki kontribusi dalam mempengaruhi luas pengungkapan *intellectual capital* pada laporan tahunan perusahaan.
3. Penelitian sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Keunggulan metode ini adalah peneliti dapat memilih sampel yang tepat, sehingga peneliti akan memperoleh data yang memenuhi kriteria untuk diuji. Namun, penggunaan metode *purposive sampling* berakibat

pada kurangnya kemampuan generalisasi dari hasil penelitian.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan jumlah sampel yang lebih banyak dengan tahun pengamatan yang lebih panjang dalam penelitian-penelitian berikutnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya yang tertarik untuk meneliti judul yang sama sebaiknya mempertimbangkan dan mencari variabel independen lain yang berpengaruh terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*, seperti : komite audit dan konsentrasi kepemilikan.
3. Melakukan penelitian tidak hanya menggunakan sampel dari perusahaan perbankan tetapi dengan seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeysekera, I. 2007. Intellectual Capital Reporting Differences between A Developed and Developing Nation. *Journal of Intellectual Capital*, 8(2): 329-345.
- Abeysekera, I. 2008. Motivation behind Human Capital Disclosure in Annual Reports. *Accounting Forum*, 32 (1): 1-13.
- Abeysekera, I. 2010. The Influence of Board Size on Intellectual Capital Disclosure by Kenyan Listed Firms. *Journal of Intellectual Capital*, 11(4): 504–518.
- Abeysekera, I., & Guthrie, J. 2005. An Empirical Investigation of Annual Reporting Trends of Intellectual Capital in Srilanka. *Critical Perspective on Accounting*, 16: (1): 151-163.

- Achmad, T. 2012. Dewan Komisaris dan Transparansi: Teori Keagenan atau Teori Stewardship?. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1): 1-12.
- Allegrini, M., & Greco, G. 2011. Corporate Boards, Audit Committees and Voluntary Disclosure: Evidence from Italian Listed Companies. *Journal of Management and Governance*, 17 (1): 187-216.
- An, Y., Davey, H. & Eggleton, I.R.C. 2011. Towards a comprehensive theoretical framework for voluntary IC disclosure. *Journal of Intellectual Capital*, 12 (4): 571-585.
- Arifah, Dista. 2012. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Intellectual Capital: Pada Perusahaan Ic Intensive. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9 (2): 189-211.
- Bontis, N., William, C. C. L., & Richardson, R. 2000. Intellectual Capital and Business Performance in Malaysian Industries. *Journal of Intellectual Capital*, 1(1): 85-100.
- Bukh, P., 2003. A Paradox. The Relevance of Intellectual Capital Disclosure. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 16: 49-56.
- Cerbioni, F. & Parbonetti, A. 2007. Exploring the effects of corporate governance on intellectual capital disclosure: an analysis of European biotechnology companies. *European Accounting Review*, 16 (4): 791-826.
- FCGI. 2001. *Tata Kelola Perusahaan (Corporate Governance)*. Edisi ke-2: Jakarta.
- Goh, P.C. & Lim, K.P. 2004. Disclosing intellectual capital in company annual reports: evidence from Malaysia. *Journal of Intellectual Capital*, 5 (3): 500-510.
- Guthrie, J, Petty & Yongvanich, K. 2004. Using content analysis as a Research Method to Inquire Into Intellectual Capital Reporting. *Journal of Intellectual Capital*, 5 (2): 282-293.
- Guthrie, J., P. Richard & F. Ricceri. 2006. The voluntary reporting of intellectual capital: comparing evidence from Hong Kong and Australia. *Journal of Intellectual Capital*, 7 (2).
- Haji, A.A. & Ghazali, Mohd. 2012. Intellectual capital disclosure trends: some Malaysian evidence. *Journal of Intellectual Capital*, 13 (3).
- Haji, A.A & Ghazali, Mohd. 2013. A Longitudinal Examination of Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Attributes in Malaysia. *Asian Review Of Accounting*, 21: 27-52.
- Hidalgo, R. L., Emma G. M. & Isabel M. 2011. Corporate Governance and Intellectual Capital Disclosure. *Journal of Business Ethics*, 100: 483-495.
- Holland, J. 2006. Fund management, intellectual capital, intangibles and private disclosure. *Managerial Finance*, 32(4).
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2010. *Aktiva Tidak Berwujud (Revisi 2010)*, PSAK No. 19.
- Jensen, M.C. & Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3: 303-360.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Li, J. R. Pike, & R. Haniffa. 2008. Intellectual capital Disclosure and Corporate Governance Structure in UK Firms. *Accounting and Business Research*, 38 (2): 137-159
- Mohd Ghazali, N. A., & Weetman, P. 2006. Perpetuating Traditional Influences: Voluntary Disclosure in Malaysia Following The Economic Crisis. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 15: 226-248.
- Nugroho, Ahmadi. 2011. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure. *Accounting*

- Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 *Tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta
- Purnomosidhi, Bambang. 2006. Praktik Pengungkapan Intellectual capital pada Perusahaan Publik DI BEJ. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, 9 (1): 1-20.
- Putri, I.N & Chairiri. 2016. Anteseden dan Konsekuensi Intellectual Capital Disclosure. *Simposium Nasion Akuntansi XIX*. Lampung.
- Santoso, Setyarini. 2012. Pengaruh Modal Intelektual dan Pengungkapannya Terhadap Kinerja Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 14.
- Shiddiq, N.R. & Ningrum, N.R. 2013. Analisis Pengaruh Intellectual Capital dan Good Corporate Governance terhadap Financial Performance. *Diponegoro Journal of Accountin*, 1 (2).
- Singh, I. & Zahn, V.J. 2008. Determinants of intellectual capital disclosure in prospectuses of initial public offerings. *Accounting and Business Research*, 38 (5): 409-431.
- Suhardjanto, D. & Wardhani M. 2010. Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *JAAI*, 14 (1): 71-85
- Sveiby, K.E. 1997. *The New organization wealth: Managing and Measuring Knowledge-based Assets*. San Fransisco, CA: Berret-Koehler Publishers.
- Taliyang, S.M, & Jusop, M. 2011. Intellectual Capital Disclosure and Corporate Governance Sturcture: Evidence in Malaysia. *International Journal of Business and Management*, 6(2): 109-117.
- Uzliawati, Lia. 2015. Dewan Komisaris dan Intellectual Capital Disclosure Pada Perbankan di Indonesia. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 19 (2): 226-234.
- Wardhani, M. & Suhardjanto, D. 2010. Praktik Intellectual Capital Disclosure Perusahaan yang terdaftar di BEI. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 14(1): 71-85.
- Waryanto. 2010. Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia. *Skripsi*. Universitas Diponegoro
- Whiting, R.H. & Miller, J.C. 2008. Voluntary disclosure of intellectual capital in New Zealand annual reports and the 'hidden value'. *Journal of Human Resource Costing & Accounting*, 12(1): 26-50.
- Zulkarnaen, E.I., & A. Mahmud. 2013. Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Intellectual Capital. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 5(1).